

**TINJAUAN PEMBAYARAN PAJAK HOTEL BINTANG I DI BADAN
KEUANGAN KOTA BUKITTINGGI**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen
Pajak (DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Ahli Madya*



**BAMBANG PRASETYO
NIM 16233010**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PAJAK
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2019**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

TINJAUAN PEMBAYARAN PAJAK HOTEL BINTANG I DI BADAN

KEUANGAN KOTA BUKITTINGGI

Nama : BAMBANG PRASETYO

NIM : 16233010

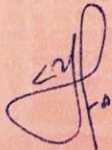
Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak

Fakultas : Ekonomi

Padang, Agustus 2019

Diketahui Oleh :
Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak

Disetujui Oleh :
Pembimbing



Chichi Andriani, SE,MM
NIP.19840107 200912 2 002



Yolandafitri Zulvia, SE, M.Si
NIP.19861231 201504 2 002

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

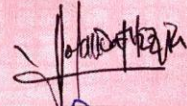
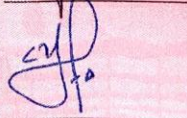

**TINJAUAN PEMBAYARAN PAJAK HOTEL BINTANG I DI BADAN
KEUANGAN KOTA BUKITTINGGI**

Nama : BAMBANG PRASETYO
NIM : 16233010
Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir
Program Studi Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, Agustus 2019

Tim Penguji

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Yolandafitri Zulvia, SE, M.Si	(Ketua)	
2. Chichi Andriani, SE, MM	(Anggota)	
3. Okki Trinanda, SE, MM	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Bambang Prasetyo
Thn. Masuk/NIM : 2016/ 16233010
Tempat/Tgl. Lahir : Bukittinggi, 03 Maret 1997
Peogram Studi : Manajemen Pajak
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Balai Panjang Jorong III Kampung
Judul Tugas Akhir : Tinjauan pembayaran pajak hotel Bintang I di Badan Keuangan Kota Bukittinggi.

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik di Universitas Negeri Padang maupun perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam tugas akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penuisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas akhir ini sah apabila ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa cabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 25 Agustus 2019



Bambang Prasetyo
NIM. 16233010

ABSTRAK

Bambang Prasetyo : Tinjauan Pembayaran Pajak Hotel Bintang I di Badan Keuangan Kota Bukittinggi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Pembayaran Pajak Hotel Bintang 1 di Badan Keuangan Kota Bukittinggi. Metode yang di gunakan adalah metode deskriptif, yaitu metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian. Data di kumpulkan melalui wawancara dan juga di peroleh dari sumber - sumber yang telah ada pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi dan Dinas Pariwisata kota Bukittinggi. Berdasarkan hasil penelitian di ketahui bahwa penerimaan pajak Hotel Bintang 1 belum berjalan dengan optimal. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan, penetapan, pembukuan dan pelaporan, pemungutan dan penagihan wajib pajak, Masih kurang dalam melaksanakan sistem penerimaan pajak hotel di Kota Bukittinggi itu di lihat dari realisasi penerimaan pajak hotel Bintang 1 di Badan Keuangan Kota Bukittinggi dari tahun 2016 - 2018 mengalami penurunan dari target yang di tetapkan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Realisasi penerimaan pendapatan Pajak Hotel terhadap target yang telah di tetapkan pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi mengalami penurunan. Pada tahun 2016 tingkat pencapaian penerimaan pajak Hotel Bintang 1 sebesar 50,66%, dari persentase penerimaan pendapatan yang tidak mencapai 100%. pada tahun 2017 tingkat pencapaian sebesar 30,74%, maka penerimaan pendapatan pajak pada tahun 2017 menurun kembali. Dan pada tahun 2018 tingkat pencapaian sebesar 28,96%, ini menjadi suatu masalah kenapa target yang telah di tetapkan Badan Keuangan dari tahun 2016-2018 tidak mencapai target, ada faktor - faktor yang mempengaruhi kenapa target dan realisasi hotel Bintang 1 tidak tercapai.

Kata Kunci : Pajak Hotel, Realisasi Penerimaan Pajak Hotel, Sistem Penerimaan Pajak Hotel.

KATA PENGANTAR

Assalammu'alaikum Warahmatullaahiwabarakatuh.

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul "**Tinjauan Pembayaran Pajak Hotel Bintang I Di Badan Keuangan Kota Bukittinggi**". Tugas akhir ini merupakan persyaratan yang harus di penuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan tugas akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya kepada :

1. Orang tua tercinta, yakni ayahanda Andrizal dan ibunda Wasnita serta saudara laki-laki saya Alan Budiandri dan saudari perempuan saya Ridha Nabila yang teramat saya sayangi untuk nenek saya Zubaidar yang terus memberikan motivasi untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan ini dengan lancar.
2. Bapak Dr. Idris, M. Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Chichi Andriani, SE, MM selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak.
4. Ibu Yolandafiri Zulvia, SE, M.Si selaku dosen pembimbing tugas akhir.
5. Ibu Rosyeni Rasyid, SE,ME selaku dosen pembimbing akademik.

6. Bapak dan Ibu selaku tim penguji yang telah memberikan saran dan masukan untuk memperbaiki dalam kesempurnaan tugas akhir.
7. Bapak/ Ibu Dosen yang mengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
8. Bapak/ Ibu Dosen, Staf pengajar dan Karyawan Program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
9. Terima Kasih Keluarga Besar BEM, Keluarga Besar HMJ Manajemen dan Teman – teman Manajemen Pajak Angkatan 2016 yang telah memberikan pengalaman , ilmu dan kebersamaan dalam organisasi serta yang sama-sama berjuang untuk mendapatkan gelar A.Md dan terima kasi untuk kebersamaan nya baik suka dan duka.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Dengan lapang dada penulis menerima kritik dan saran yang bersifat memberi pengarahan untuk menuju perbaikan laporan ini. Mudah-mudahan laporan ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Padang, Agustus 2019

Bambang Prasetyo
NIM. 16233010

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Pengertian Pajak.....	7
B. Pajak Daerah.....	9
1. Pengertian Pajak Daerah.....	9
2. Jenis Pajak Daerah.....	10
C. Pajak Hotel.....	10
D. Objek Pajak Hotel.....	11
1. Objek Pajak Hotel.....	11
2. Bukan Pajak Hotel.....	11
E. Subjek Pajak Hotel.....	12
F. Klasifikasi Hotel.....	12
G. Dasar Pengenaan, Tarif Pajak dan Perhitungan Pajak.....	15
1. Dasar Pengenaan Pajak Hotel.....	15
2. Tarif Pajak Hotel.....	15
3. Perhitungan Pajak Hotel.....	15
H. Sistem Penerimaan Pajak.....	16
I. Definisi Konsep.....	16
BAB III METODE PENELITIAN.....	18
A. Bentuk Penelitian.....	18
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	18
C. Rancangan Penelitian.....	19
BAB IV PEMBAHASAN.....	22
A. Gambaran Umum Badan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi.....	22
B. Visi dan Misi.....	23
C. Tugas Pokok dan fungsi Badan Keuangan.....	24
D. Struktur Organisasi.....	24

E Produk – produk/ Kegiatan Utama Perusahaan	25
F. Hasil Penelitian dan Pembahasan	32
1. Kondisi Perhotelan di Kota Bukittinggi	32
2. Sistem Penerimaan Pajak Hotel di Kota Bukittinggi.....	35
G. Hambatan yang di hadapi dalam penerimaan pajak hotel di Kota Bukittinggi.....	48
H. Upaya dalam meningkatkan penerimaan pajak hotel Bintang I di Kota Bukittinggi.....	51
BAB V PENUTUP	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tabel Jumlah Wisatawan yang Menginap di Hotel Kota Bukittinggi	2
Tabel 2	Tabel Perkembangan Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Hotel Bintang I Kota Bukittinggi.....	4
Tabel 3	Tabel Jumlah Wajib Pajak Hotel Kategori Hotel Bintang I Pada Kantor Badan Keuangan Kota Bukittinggi.....	33
Tabel 4	Jumlah objek pajak hotel yang terdata usahanya pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi.....	37
Tabel 5	Permasalahan dan Tindakan dalam proses Kegiatan Pendaftaran Dan Pendataan Hotel Pada Badan Keuangan Kota Bukittinggi.....	38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Gambar Struktur Organisasi Badan Keuangan Kota Bukittinggi.....	25
Gambar 2. Sistem Penerimaan Pajak hotel di Kota Bukittingg.....	35
Gambar 3. Rangkaian proses pendaftaran dan pendataan pajak di Kota Bukittinggi	36
Gambar 4. Rangkaian proses penetapan pajak hotel Kota Bukittinggi	39
Gambar 5. Rangkaian proses pembukuan dan pelaporan pajak hotel di Kota Bukittinggi	41
Gambar 6. Rangkaian proses penyetoran pajak hotel di Kota Bukittinggi.....	43
Gambar 7. Rangkaian proses penagihan pajak hotel di Kota Bukittinggi	44

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Pengajuan Observasi
- Lampiran 2. Surat Balasan Pengajuan Observasi
- Lampiran 3. Stuktur Organisasi Badan Keuangan Kota Bukittinggi
- Lampiran 5. Daftar Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi tahun 2016
- Lampiran 6. Daftar Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi tahun 2017
- Lampiran 7. Daftar Pendapatan Daerah Kota Bukittinggi tahun 2018
- Lampiran 8. Daftar Pertanyaan
- Lampiran 9. Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk menjalankan pemerintahan, mengelola pembangunan dan sumber daya dan meningkatkan penerimaan daerah semenjak di berlakukannya otonomi daerah di Indonesia sehingga pemerintah daerah diuntut untuk menggali potensi dan kemampuan di daerahnya masing – masing semaksimal mungkin. Tujuan di berlakukannya otonomi daerah tersebut adalah untuk mensejahterakan masyarakat dan melaksanakan pembangunan di daerahnya. Untuk mencapai hal tersebut maka pemerintah daerah diuntut untuk bisa mencari sumber penerimaan daerahnya masing - masing yang mampu memenuhi pengeluaran dan pembiayaan daerahnya.

Salah satu jenis penerimaan pemerintah daerah atau yang dikenal dengan pendapatan asli daerah (PAD) adalah dari pajak daerah. Pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah. Salah satu pajak daerah yang potensinya semakin berkembang di Kota Bukittinggi seiring dengan semakin di perhatikannya komponen sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan sehingga dapat menunjang berkembangnya bisnis rekreasi (pariwisata) adalah pajak hotel. Pada awalnya pajak atas hotel disamakan dengan pajak restoran dengan nama pajak hotel dan restoran. Pada tahun 2000 dikeluarkan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang berisikan tentang

perubahan pajak daerah dan retribusi sehingga pajak hotel dan pajak restoran dipisahkan menjadi jenis pajak yang berdiri sendiri. Dengan dipisahkannya pajak hotel dan pajak restoran mengindikasikan besarnya potensi pajak hotel dan kontribusinya terhadap pembangunan suatu daerah.

Kota Bukittinggi merupakan kota terbesar kedua di Propinsi Sumatera Barat, Indonesia. Dimana pendapatan terbesar dari Kota Bukittinggi berasal dari pariwisata. Saat ini, Kota Bukittinggi telah ditetapkan sebagai salah satu daerah di Sumatera Barat yang menjadi destinasi pariwisata halal dunia (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2016). Kota Bukittinggi sebagai destinasi pariwisata terbukti dari hasil perhitungan jumlah wisatawan domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke Kota Bukittinggi berdasarkan data wisatawan yang menginap berikut data wisatawan yang menginap di Hotel Kota Bukittinggi.

Tabel 1 Jumlah Wisatawan Yang Menginap Di Hotel Kota Bukittinggi

Tahun	Jumlah wisatawan		
	Mancanegara	Nusantara	Jumlah
2016	27.516	511.258	538.774
2017	30.412	516.483	546.895
2018	31.841	546.016	577.857

Sumber : Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi 2019

Dari data di atas berdasarkan tingkat kunjungan wisatawan yang menginap di hotel Kota Bukittinggi pada tahun 2016 mencapai 538.774 wisatawan, lalu di tahun 2017 jumlah wisatawan yang menginap 546.895 dan di tahun 2018 jumlah wisatawan yang menginap berjumlah 577.857 wisatawan. Untuk wisatawan mancanegara yang jumlah wisatawan dari tahun 2016, 2017 dan 2018 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.

Sedangkan wisatawan mancanegara terbanyak berkunjung ke kota Bukittinggi ialah negara Malaysia sebanyak 21.102 wisatawan mancanegara yang didukung dengan kekayaan alam dan budaya yang di miliki Kota Bukittinggi (Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi 2019).

Dengan meningkatnya jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Bukittinggi berdampak kepada penyedia jasa penginapan/ peristirahatan seperti hotel. Berdasarkan Undang - Undang No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 20 dan 21, setiap hotel akan di kenakan pajak yang disebut dengan pajak hotel. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel (mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh).

Salah satu klasifikasi hotel yang ada di Kota Bukittinggi adalah Hotel Bintang 1, dimana hotel bintang 1 merupakan jenis hotel yang tergolong kecil karena di kelola oleh pemiliknya langsung dan biasanya berada di kawasan yang ramai dan memiliki akses transportasi umum yang dekat dengan tempat hiburan dengan harga yang terjangkau. Disini peneliti mengambil objek penelitian di Hotel Bintang 1 yang ada di Kota Bukittinggi karena adanya penurunan persentase target dan realisasi penerimaan pajak dari tahun 2016 - 2017 - 2018. Berikut data perkembangan realisasi dan target penerimaan pajak hotel Bintang 1 Kota Bukittinggi dari tahun 2016, 2017, 2018.

Tabel 2 Perkembangan Realisasi dan Target Penerimaan Pajak Hotel Bintang I Kota Bukittinggi Tahun 2016, 2017, 2018

Tahun Anggaran	Target Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Pajak Hotel (Rp)	Persentase Target Terhadap Realisasi (%)
2016	1.825.360.450	924.800.539	50,66
2017	2.325.360.450	714.921.687	30,74
2018	2.325.360.450	673.401.248	28,96

Sumber : Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Kota Bukittinggi Tahun 2019

Dari Tabel di atas dapat kita lihat bahwa persentasi realisasi Pajak Hotel 2016 proporsi target realisasi mencapai 50,66% di tahun 2017 mengalami penurunan 19,92 % dari proporsi target 30.74 % lalu di tahun 2018 mengalamiz penurunan kembali sekitar 1.78 % dari proporsi target 28,96.

Ini merupakan angka penurunan yang sangat tajam. Hal ini karena penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bukittinggi terus meningkat nilainya dari tahun ke tahun tetapi ini tidak diimbangi dengan peningkatan dalam penerimaan pajak hotel. Justru penerimaan pajak hotel Bintang I terus-menerus menurun. Ini mengindikasikan bahwa Pajak Hotel Bintang I kurang memiliki kontribusi terhadap penerimaan daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan pada nantinya. Dari tahun 2016 angka kontribusi penerimaan pajak hotel Bintang I terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mulai menunjukkan penurunan.

Pengelolaan Pajak Daerah Kota Bukittinggi di kelola oleh Badan Keuangan Kota Bukittinggi. Badan Keuangan Kota Bukittinggi memiliki tugas membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keuangan salah satunya masalah pajak. Di Badan Keuangan Kota Bukittinggi memiliki tugas untuk menyusun kebijakan teknis bidang keuangan lalu

mendukung teknis bidang keuangan serta melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan.

Dari latar belakang di atas maka penulis tertarik ingin meneliti lebih lanjut **“Tinjauan Pembayaran Pajak Hotel Bintang 1 Di Badan Keuangan Kota Bukittinggi”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana Tinjauan Pembayaran Pajak Hotel Bintang I Di Badan Keuangan Kota Bukittinggi.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang akan dibahas, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui. Tinjauan Pembayaran Pajak Hotel Bintang I Di Badan Keuangan Kota Bukittinggi.

D. Manfaat penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran bagi pemerintah kota Bukittinggi khususnya Badan Keuangan Kota Bukittinggi dalam melaksanakan pemungutan Pajak Hotel. Selain itu dapat menjadi tambahan referensi bagi penelitian selanjutnya.

1. Bagi Penulis

Penelitian ini untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar ahli madya dan sebagai bahan untuk menambah wawasan pengetahuan penelitian sekaligus sebagai suatu penerapan teori msnajemen perpajakan yang telah di pelajari selama ini didalam aktivitas perkulihaan.

2. Bagi instansi

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagaimana tinjauan pembayaran pajak hotel bintang I di Badan Keuangan Kota Bukittinggi yang di kelola oleh instansi termasuk dalam kategori baik atau sebaliknya.

3. Bagi Pihak Lain

Tugas Akhir ini bisa digunakan sebagai tambahan sumber informasi bagi pihak yang berkepeten terhadap masalah yang dibahas, sekaligus laporan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan ilmiah.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari bab sebelumnya mengenai Bagaimana Tinjauan Pembayaran Pajak Hotel Bintang I di Badan Keuangan Kota Bukittinggi, maka selanjutnya dapat di ambil kesimpulan sebagai akhir dari penulisan dan juga menjawab permasalahan ini bawasannya dalam tinjauan pembayaran pajak hotel Bintang I di Badan Keuangan Kota Bukittinggi masih ada kendala yang membuat penerimaan pajak hotel bintang I tidak mencapai target, yang pertama berkurangnya jumlah hotel Bintang I pada tahun 2017 sebanyak lima hotel dan di tahun 2018 masih tetap sama yakni lima hotel, dimana yang sebelumnya di tahun 2016 jumlah hotel Bintang I sebanyak 10 hotel, penyebab turunnya hotel Bintang I di karenakan adanya empat hotel naik kelas menjadi hotel Bintang II dan satu hotel turun kelas menjadi hotel melati.

Selanjutnya yang kedua target yang di tetapkan oleh Badan keuangan Kota Bukitinggi bekerja sama dengan DPRD Kota Bukittinggi dalam penerimaan pajak hotel Bintang I terlalu tinggi. Faktor yang ketiga masih ada wajib pajak yang melakukan pelanggaran baik dalam pengisian formulir pendaftaran dan dalam melakukan pembayaran pajak hotel. Dan faktor yang ke empat dalam sistem penerimaan pajak hotel yang di kelola oleh Badan Keuangan Kota Bukittinggi masih terdapat kekurangan baik dalam sistim penerimaan pajak sesuai dengan Perda Kota Bukittinggi Nomor & Tahun 2012 yakni pertama pendaftaran dan pendataan, kedua penetapan, ketiga pembukuan dan pelaporan, keempat pemungutan dan penagihan masih

kurangnya kualitas pegawai Badan Keuangan Kota Bukittinggi yang berakibat kurang optimalnya penerimaan pajak hotel Bintang I di Kota Bukittinggi. itulah Tinjauan Pembayaran Pajak Hotel Bintang I di Badan Keuangan Kota Bukittinggi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah di rangkum, adapun saran yang di berikan penulis sebagai masukan bagi pemerintah daerah Kota Bukittinggi dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak hotel bintang I, agar kedepannya Badan Keuangan Kota Bukittinggi dapat memaksimalkan penerimaan pajak hotel bintang I dengan memperhatikan beberapa aspek yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak hotel bintang I. di Badan Keuangan Kota Bukittinggi, agar anggaran penerimaan pendapatan pajak hotel bintang I yang di targetkan dapat tercapai dengan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Keuangan Kota Bukittinggi. 2019. Data Hotel Kota Bukittinggi.
- Badan Keuangan Kota Bukittinggi. 2019. Data Pendapatan Asli Daerah Kota Bukittinggi
- Devano dan Rahayu.2006.*Perpajakan : Konsep, Teori dan Isu*, Jakarta : Kencana
- Djajadiningrat. 2017. *Perpajakan Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat
- Dinas Pariwisata Kota Bukittinggi. 2018. Data Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancan Negara.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan (Edisi revisi)*, Jakarta : C.V Andi offset.
- Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel.
- Siahaan, Marihot P. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.